

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Komisi E DPRD Jakarta Perjuangkan Anggaran Sekolah Gratis

Palmerah, Warta Kota

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar merealisasikan program sekolah swasta gratis tanpa menghapus bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Pasalnya program tersebut sangat dinanti masyarakat Jakarta, terutama warga yang kurang mampu sebagai langkah pemerataan pendidikan.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin menyatakan, siap memperjuangkan program sekolah

swasta gratis dan KJP Plus dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pekan depan. Rapat Banggar akan membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

"Anggaran bisa dikonsultasikan di Banggar nanti," ujar Thamrin usai rapat konsultasi program kerja tahun 2025, Rabu (23/10/2024).

Menurut Thamrin, kedua program tersebut harus diprioritaskan dan bisa memanfaatkan anggaran dari penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer sebesar Rp 6,8 triliun. Duit sebanyak itu diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Ada tambahan sekitar Rp 6 triliun, paling tidak bisa mendapatkan atensi dari eksekutif supaya bisa menjalankan MoU itu (program sekolah gratis)," ungkap politisi PKS ini.

Thamrin mengungkapkan, program KJP Plus masih dibutuhkan anak Jakarta untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Dana tersebut bisa diperlukan sebagai biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi. "Kalau sekolah gratis diterapkan, KJP untuk anak sekolah ditinggalkan justru kita pincang," imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, pihaknya sedang mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis. "Sasarannya sekolah mana saja, kriterianya apa, itu masuk dalam kajian," ucap Purwosusilo.

Dia juga menyampaikan, telah membuat

simulasi bantuan untuk menunjang keperluan sekolah, seperti biaya seragam dan sepatu.

"Konsep sekolah gratis, sekolahnya tidak bayar, kebutuhan dasarnya difasilitasi. Cuma namanya bukan KJP, biaya untuk baju seragam, sepatu, kami sudah buat simulasinya," ujarnya.

****APBD Jakarta naik****

Sementara itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jakarta mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Angka ini naik sekitar Rp 9,4 triliun dari postur APBD 2024 Rp 81,7 triliun.

Itu terungkap saat TAPD Provinsi Jakarta menggelar rapat dengan Banggar DPRD DKI Jakarta pada Selasa (22/10/2024) petang. Rapat membahas soal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.

TAPD mengusulkan besaran APBD 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Terdiri dari Rancangan Awal Rp 84,32 triliun dan Penyesuaian Alokasi Belanja atas Penambahan Pendapatan Transfer Rp 6,8 triliun.

Sedangkan Pendapatan Daerah Rp 74,87 triliun, Belanja Daerah Rp 75,51 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 9,45 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 8,81 triliun.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi. Selanjutnya, dibahas Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

"Konsultasi antara komisi dan Banggar, dan akan disampaikan ketika rapat Banggar lanjutan pada hari Senin pekan depan -Red," ujar Ima yang dikutip pada Rabu (23/10/2024).

(faf)